

# IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO

Febriani Napu  
NPP. 32.0960

Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo  
Program Studi Keuangan Publik  
Email: [32.0960@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0960@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. H. Bahrullah Akbar, M.B.A, CIPM, CPA, CA, CSFA, CFrA, CGCAE, QGIA

## ABSTRACT

**Problem Statement:** The Regional Government Information System (SIPD) is an innovation developed by the central government to support financial management in local governments. However, in its implementation, various obstacles are still often found, such as limited human resources, infrastructure, and organizational readiness in managing digital change. **Purpose:** The purpose of this study is to see the effectiveness of the implementation of SIPD, identify the inhibiting factors, and outline the efforts made to make this system run well. **Method:** This study uses an inductive approach with a descriptive qualitative method, as well as collecting data through interviews, observations, and documentation. The data analysis process is carried out by reducing, presenting, and drawing conclusions from the collected data. **Result:** The results of the study show that the implementation of SIPD before running is optimal. This is due to the lack of socialization and training to users, lack of coordination between BAPPEDA and OPD, lack of expert assistants, limited human resources who understand the system, and slow response from the central government when there are obstacles. **Conclusion:** Several steps have been taken by the central government, following training and technical guidance, improving communication across agencies, and continuing to use other systems as companions in the implementation of planning and budgeting. Therefore, more regular training, maximum mentoring, and system updates are needed so that SIPD can be implemented more effectively.

**Keywords:** Regional Government Information System (SIPD), Planning, Budgeting, Implementation

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian):** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Namun, dalam penerapannya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan digital. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan SIPD, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta menguraikan upaya yang dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif deskriptif, serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD sebelum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada

pengguna, kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, minimnya tenaga pendamping yang ahli, keterbatasan SDM yang memahami sistem, serta respons dari pemerintah pusat yang lambat saat ada kendala. **Kesimpulan:** Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatkan komunikasi lintas instansi, serta tetap menggunakan sistem lain sebagai pendamping dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih rutin, pendampingan yang maksimal, dan pembaruan sistem agar SIPD bisa diterapkan dengan lebih efektif.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perencanaan, Penganggaran, Implementasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak era reformasi, Indonesia mengalami transformasi mendasar dalam sistem pemerintahan, termasuk pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada semangat desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah pusat mendorong pemda untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran menjadi dua aspek yang sangat vital. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan pembangunan yang nyata dan prioritas masyarakat, namun juga wajib melaksanakannya secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, sistem pendukung yang andal menjadi sangat penting untuk menunjang proses ini.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance), Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang sebagai sistem terpadu yang mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan non-teknis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknis pengoperasian SIPD secara menyeluruh. Masalah ini diperparah dengan kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan belum meratanya tingkat literasi digital di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, gangguan jaringan dan keterbatasan infrastruktur teknologi juga sering menghambat proses input data dalam SIPD, khususnya pada saat-saat krusial seperti menjelang tenggat waktu pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Di Kota Gorontalo, SIPD mulai diterapkan pada tahun anggaran 2021. Meskipun telah menunjukkan progres, masih terdapat OPD yang belum sepenuhnya melakukan input data secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini berdampak pada ketidaksinkronan data antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta memperlambat proses pengambilan keputusan. Keterlambatan ini bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai institusi kunci dalam proses perencanaan dan penganggaran, memiliki peran sentral dalam memastikan sistem ini berjalan

secara optimal. Namun, keberhasilan implementasi SIPD di lingkungan BAPPEDA tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis dan infrastruktur, tetapi juga pada faktor komunikasi, koordinasi antarlembaga, dan komitmen birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana sistem ini diimplementasikan, apa saja kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan dapat dilakukan ke depan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mulai diterapkan secara resmi pada Tahun Anggaran 2021 sebagai sistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung perencanaan dan penganggaran daerah secara nasional. Namun, implementasinya di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya di bawah koordinasi Bappeda, masih belum mencapai titik optimal. Salah satu indikator nyata dari ketidakefektifan pelaksanaan SIPD adalah rendahnya tingkat keterlibatan penuh dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data penelitian menunjukkan bahwa dari total 47 OPD di Kota Gorontalo, hanya 43 OPD (91,5%) yang berhasil menginput data ke dalam SIPD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sementara 4 OPD (8,5%) lainnya belum melakukan input sama sekali pada periode pengamatan. Ketidakterlibatan sebagian OPD ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi berdampak langsung terhadap keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan secara keseluruhan, karena sistem SIPD tidak akan memproses output secara utuh apabila input dari seluruh unit belum lengkap. Keterlambatan ini sangat mengganggu proses penyusunan dokumen strategis seperti RKPD dan KUA-PPAS, yang memiliki batas waktu pengesahan yang ketat dan mengikat secara hukum.

Pada aspek teknis dan sumber daya manusia. SIPD merupakan sistem daring yang sangat bergantung pada koneksi internet dan server pusat. Dalam praktiknya, sering terjadi gangguan akses, terutama menjelang batas waktu penginputan data. Gangguan teknis ini diperburuk oleh kurangnya tenaga teknis yang benar-benar memahami operasional SIPD. Sebagian besar pegawai yang diberi tanggung jawab sebagai admin atau user belum memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek penggunaan teknologi maupun pemahaman terhadap substansi dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini menyebabkan kesalahan input data dan penurunan kualitas dokumen yang dihasilkan. Keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarinstansi, mengingat SIPD mengharuskan sinkronisasi data dari seluruh OPD agar menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang valid. Masalah seperti keterlambatan penginputan, ketidaksesuaian nomenklatur, hingga kurangnya pemahaman antar OPD terhadap mekanisme sistem seharusnya menjadi bagian integral dari analisis implementasi SIPD.

Selain itu, peran kelembagaan lokal seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai motor penggerak utama proses perencanaan belum banyak ditelaah secara akademik. Bappeda tidak hanya bertugas menyusun dokumen perencanaan dan mengompilasi masukan dari OPD, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kondisi faktual di daerah. Dalam konteks SIPD, Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem dijalankan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta bertindak sebagai fasilitator untuk mengatasi hambatan teknis seperti gangguan sistem dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, minimnya kajian ilmiah yang mendalami bagaimana Bappeda mengelola tantangan teknis maupun non-teknis dalam penerapan SIPD menjadi celah yang signifikan, yang dapat diisi oleh penelitian ini sebagai kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan di Indonesia.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari berbagai studi sebelumnya yang secara umum membahas implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran di berbagai daerah. Masing-masing penelitian memberikan kontribusi yang berbeda, baik dalam hal konteks wilayah, pendekatan analisis, maupun fokus masalah yang diteliti. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan adalah studi oleh (Afifah et al., 2023) yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah membantu menunjang perencanaan pembangunan daerah, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti tidak tersedianya SOP, seringkali terjadi kesalahan server, serta tidak sesuai indikator SIPD dengan kondisi lokal. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan teknis bagi OPD, pengembangan sistem lokal, dan penguatan konektivitas.

Sementara itu, penelitian oleh (Erlambang, 2023) di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengidentifikasi hambatan serupa, seperti rendahnya kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem, sistem yang kurang fleksibel, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat tergantung pada kesiapan teknis dan koordinasi lintas organisasi. Fokus yang diberikan pada evaluasi hambatan ini relevan dengan konteks penelitian di Kota Gorontalo, di mana tantangan teknis dan manajerial juga menjadi isu sentral. Lebih jauh, penelitian oleh (Vira & Husna, 2022) di Kabupaten Aceh Barat mengangkat pentingnya kerja sama antar-pemerintah daerah dan perlunya pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan SIPD. Temuan mereka menunjukkan bahwa kegagalan dalam jaringan dan kurangnya otoritas pusat dalam regulasi pelaksanaan sistem menyebabkan fungsi SIPD tidak berjalan optimal. Penelitian ini mempertegas pentingnya struktur kelembagaan dan kolaborasi multistakeholder dalam pengelolaan sistem informasi publik.

Penelitian lain oleh (Onta et al., 2024) yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara menekankan pada evaluasi efektivitas SIPD dalam meningkatkan realisasi anggaran. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah mengalami peningkatan efisiensi penganggaran setelah menggunakan SIPD, meskipun masih terdapat hambatan dalam bentuk keterlambatan input data oleh OPD. Ini mengindikasikan bahwa SIPD memiliki potensi besar dalam mendukung tata kelola keuangan yang efektif, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan implementasi dan keaktifan seluruh aktor terlibat. Adapun penelitian oleh (Sari, 2022) di Kabupaten Kutai Timur menggunakan pendekatan teori implementasi George C. Edward III dan menyimpulkan bahwa implementasi SIPD di wilayah tersebut hanya memenuhi dua dari empat indikator utama, yaitu komunikasi dan disposisi. Indikator sumber daya dan struktur birokrasi masih dianggap lemah, yang berimbas pada kurang optimalnya penerapan sistem. Penelitian ini relevan dengan konteks Kota Gorontalo yang juga mengalami kendala dalam hal kesiapan SDM dan koordinasi kelembagaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yamin et al., 2025) berjudul “*Moderation of Human Resource Competencies in Quality of Financial Statements*” meneliti pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, dan lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Studi ini dilakukan pada 40 OPD di Provinsi Sulawesi Tengah dan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) melalui aplikasi WarpPLS 7.0. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya penerapan SAP yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara pemanfaatan teknologi informasi dan lingkungan pengendalian tidak memberikan pengaruh signifikan. Selain itu, kompetensi SDM juga tidak mampu memoderasi hubungan antar

variabel tersebut, yang menunjukkan bahwa peran SDM dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ulrich et al., 2024) dalam jurnal berjudul “*A Systematic Overview on the Literature in the Fields of Digitalization in Planning, Budgeting and Forecasting*” bertujuan untuk memberikan tinjauan sistematis terhadap literatur global dalam bidang digitalisasi perencanaan, penganggaran, dan peramalan keuangan. Studi ini menganalisis lebih dari 200 publikasi internasional yang membahas penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik dan korporasi, dengan fokus pada tantangan integrasi teknologi, kualitas data, tata kelola (governance), manajemen perubahan, kekurangan keterampilan, serta resistensi budaya terhadap transformasi digital. Hasil tinjauan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perencanaan dan penganggaran sangat ditentukan oleh kesiapan sistem organisasi, mulai dari tata kelola internal hingga adaptasi SDM terhadap sistem baru. Beberapa hambatan utama yang ditemukan secara global mencakup rendahnya kualitas data, lemahnya pengawasan, keterbatasan infrastruktur digital, serta resistensi dari pelaksana kebijakan terhadap perubahan struktur dan teknologi. Namun demikian, meskipun jurnal ini memberikan wawasan luas dan komprehensif mengenai kecenderungan global dalam digitalisasi sistem keuangan, tidak banyak literatur yang mengulas secara kontekstual bagaimana implementasi sistem digital tersebut berlangsung di tingkat lokal pemerintahan, terutama dalam kasus negara berkembang seperti Indonesia.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar hanya terfokus pada evaluasi teknis dan administratif SIPD seperti efektivitas sistem, hambatan teknis, serta manfaat sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan atau penganggaran, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih holistik dan mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah pada dinamika kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi SIPD, khususnya dalam konteks perencanaan dan penganggaran di Bappeda Kota Gorontalo.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo.

## **II. METODE**

Penelitian pada hakikatnya merupakan cara sistematis untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan atau menemukan jawaban atas pertanyaan tertentu melalui pendekatan ilmiah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pola pikir reflektif dan logika ilmiah, serta mengikuti tahapan yang sesuai dengan tujuan dan arah dari penyelidikan yang dilakukan (Nurdin & Hartati, 2019). Peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2020), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alamiah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur agar informan memiliki

kebebasan dalam menyampaikan informasi secara terbuka berdasarkan pengalaman dan pemahamannya. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Moleong, 2016) yang menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam mengeksplorasi informasi yang berkaitan dengan inti permasalahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna, keunikan, serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, seperti dalam studi mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-induktif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang terjadi di lapangan melalui data kualitatif yang diperoleh langsung dari para pelaku utama di lingkungan Bappeda. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, terdiri dari 10 orang yang memiliki peran strategis dalam penggunaan SIPD, antara lain Kepala Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, admin SIPD, dan user SIPD.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri, dibantu oleh pedoman wawancara dan catatan lapangan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat indikator utama keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap dimensi tersebut dioperasionalkan dalam bentuk indikator konkret yang diamati langsung melalui interaksi dan aktivitas responden selama proses perencanaan dan penganggaran berlangsung.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi SIPD Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah ditetapkan sebagai sistem utama dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah di Kota Gorontalo. Penggunaannya meliputi penyusunan dokumen penting seperti Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penginputan data dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Secara normatif, SIPD dirancang untuk menyatukan semua proses perencanaan dan penganggaran dalam satu platform terintegrasi yang sesuai dengan kebijakan nasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem ini masih belum berjalan optimal dan mengalami berbagai hambatan yang signifikan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun infrastruktur pendukung. Berdasarkan data lapangan, dari total 47 OPD yang seharusnya menginput data ke dalam SIPD, hanya 43 OPD atau sekitar 91,5% yang berhasil melaksanakan kewajiban tersebut. Sementara itu, terdapat 4 OPD atau 8,5% yang belum menginput data sama sekali. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan data dalam sistem yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Data yang tidak lengkap akan mengganggu konsistensi antarprogram dan kegiatan, menghambat proses analisis kebutuhan pembangunan, serta menurunkan validitas dokumen RKPD yang menjadi dasar kebijakan anggaran tahunan.

Adapun masalah teknis yang bersifat sistemik dan berulang. Beberapa informan menyatakan bahwa proses penginputan data sering mengalami gangguan teknis seperti sistem yang tidak responsif, aplikasi yang lambat, bahkan dalam beberapa kasus terjadi kehilangan data setelah proses input selesai dilakukan. Gangguan ini umumnya terjadi pada saat-saat krusial, yakni menjelang tenggat waktu input tahunan, ketika trafik pengguna meningkat secara drastis. Ketidakstabilan server pusat dan keterbatasan kapasitas jaringan internet di tingkat daerah semakin memperparah situasi. Pengguna sering kali harus menunggu lama atau mengulang proses input, yang berakibat pada pemborosan waktu dan tenaga. Selain itu, SIPD belum menyediakan fitur-fitur dasar yang seharusnya dimiliki oleh sistem informasi modern. Salah satu contoh paling mencolok adalah tidak tersedianya fitur penghapusan atau revisi langsung terhadap data yang keliru. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan input, pengguna di daerah tidak bisa segera melakukan koreksi dan harus mengajukan permintaan ke pusat (Kemendagri), yang memerlukan waktu respons cukup lama. Proses ini jelas memperlambat alur kerja dan menyebabkan ketidakpastian dalam validasi data.

Masalah yang tak kalah penting adalah lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Kota Gorontalo dan pemerintah pusat (Kemendagri). Ketika terjadi gangguan teknis atau muncul kebutuhan mendesak untuk klarifikasi, Bappeda sering mengalami kesulitan dalam menjangkau narahubung pusat yang dapat memberikan solusi teknis secara cepat dan akurat. Komunikasi yang seharusnya bersifat dua arah dan responsif cenderung berjalan satu arah dan tidak proaktif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya forum komunikasi teknis secara rutin antara Bappeda dan OPD berpotensi menciptakan tumpang tindih perencanaan dan duplikasi anggaran. Sebagaimana dinyatakan oleh (Hendra, 2023), efektivitas SIPD sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi lintas unit kerja agar tidak terjadi ketidaksesuaian data dan perencanaan yang tumpang tindih. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa SIPD belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sistem pendukung perencanaan. Ketiadaan fitur teknis yang lengkap, ketidakseimbangan data antar OPD, dan lemahnya komunikasi pusat-daerah menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem informasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Jika tidak segera diatasi, kendala-kendala ini akan terus menghambat kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.

### 3.2. Koordinasi Antar OPD dalam penganggaran melalui SIPD

| Perangkat Daerah                                                      | Pagu Validasi   | BATASAN PAGU    | Rincian         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan                               | 258.915.000.000 | 251.226.970.168 |                 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                | 335.000.000.000 | 335.000.000.000 |                 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang          | 70.000.000.000  | 63.445.000.000  | 6.555.000.000   |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  | 15.321.532.000  | 15.321.532.000  | 1.778.468.000   |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja                     | 10.000.000.000  | 10.000.000.000  |                 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah            | 4.928.000.000   | 5.000.000.000   | 72.000.000      |
| 1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat       | 16.670.000.000  | 16.170.424.334  | 499.575.666     |
| 2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM            | 9.440.000.000   | 8.931.763.632   | 508.236.368     |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan  | 8.666.000.000   | 8.700.000.000   | 34.000.000      |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan                                   | 5.000.000.000   | 5.000.000.000   |                 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup                         | 17.000.000.000  | 17.068.262.365  | 68.262.365      |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.700.000.000   | 4.700.000.000   |                 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                              | 7.000.000.000   | 7.000.000.000   |                 |
| 2.16.2.21.0.00.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   | 4.751.719.434   | 7.500.000.000   | 2.748.280.566   |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu        | 5.600.000.000   | 5.600.000.000   |                 |
| 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan               | 4.402.000.000   | 4.402.344.555   | 344.555         |
| 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian         | 13.642.014.042  | 13.941.977.068  | 299.963.026     |
| 3.26.2.19.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga     | 7.838.000.000   | 8.200.000.000   | 362.000.000     |
| 3.30.3.31.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian            | 8.420.000.000   | 7.420.263.039   | 999.736.263.039 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                             | 54.106.000.000  | 56.106.278.643  | 2.000.278.643   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD                               | 29.521.000.000  | 36.522.857.434  | 7.001.857.434   |
| 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 10.432.377.303  | 10.500.000.000  | 67.622.697      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan                                 | 30.735.000.000  | 30.989.567.142  | 254.567.142     |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan     | 8.800.000.000   | 8.800.000.000   | 500.000.000     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat                                    | 10.538.000.000  | 13.016.384.824  | 2.478.384.824   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Timur                           | 9.597.332.271   | 9.597.332.271   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kota Barat                           | 11.288.533.457  | 11.288.533.457  |                 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Kota Selatan                         | 8.358.434.475   | 8.358.434.475   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kota Utara                           | 9.253.804.621   | 9.253.804.621   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Duingi                               | 9.159.143.764   | 9.159.143.764   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kota Tengah                          | 9.679.106.906   | 9.679.106.906   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Hulonthalangi                        | 8.500.362.868   | 8.500.362.868   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sipatana                             | 8.078.979.077   | 8.078.979.077   |                 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Dumbo Raya                           | 8.039.569.869   | 8.039.569.869   |                 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik              | 5.010.000.000   | 5.200.000.000   |                 |

**Gambar 3.2**  
**Rekapan Inputan RKPD 2023**

Berdasarkan gambar 3.2 rekapan inputan RKPD yang tidak sesuai merupakan salah satu permasalahan teknis yang mencerminkan lemahnya koordinasi antar OPD dalam proses penganggaran melalui SIPD. Berdasarkan data rekapan inputan RKPD, ditemukan sejumlah selisih signifikan antara kolom pagu validasi, batasan pagu, dan rincian kegiatan yang menunjukkan belum terpadunya pemahaman teknis dan administratif dalam penyusunan anggaran. Misalnya, Dinas Kesehatan mencatat pagu validasi sebesar Rp535.000.000.000, sementara batasan pagu hanya Rp335.000.000.000, sehingga muncul selisih Rp200.000.000.000 yang tidak dapat dijustifikasi dalam sistem. Begitu pula dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang mencatat rincian sebesar Rp2.748.280.566 melebihi batas pagu yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa proses penginputan kegiatan belum dilakukan secara seragam dan terkoordinasi, baik antar unit internal Organisasi Perangkat Daerah maupun antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Bappeda sebagai koordinator teknis. Ketidakseimbangan jurnal ini biasanya muncul akibat kesalahan klasifikasi akun belanja, pengisian nomenklatur yang tidak tepat, serta ketidakpahaman dalam penggunaan SIPD. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek komunikasi horizontal antar OPD dan minimnya pelatihan teknis yang aplikatif. Ketiadaan forum koordinasi yang rutin dan terbatasnya pendampingan teknis juga memperburuk kondisi ini, sehingga kesalahan input harus diperbaiki secara manual melalui permohonan ke pemerintah pusat, yang memakan waktu dan menghambat kelancaran penyusunan dokumen anggaran. Oleh karena itu, permasalahan jurnal tidak seimbang dalam SIPD tidak semata bersifat teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari lemahnya integrasi kelembagaan dan rendahnya kapasitas koordinasi antar perangkat daerah.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap penggunaan SIPD masih sangat bervariasi. Perbedaan pemahaman ini utamanya terletak pada aspek teknis, khususnya dalam hal pengenalan dan penerapan klasifikasi kegiatan, penyusunan program, serta penempatan kode belanja sesuai dengan struktur nomenklatur baru yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Regulasi ini memperkenalkan sistem klasifikasi yang jauh lebih rinci dan sistematis, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan format perencanaan dan penganggaran di seluruh daerah. Namun, dalam praktiknya, transisi ke sistem baru ini tidak disertai dengan pelatihan dan sosialisasi yang memadai dari pemerintah pusat kepada daerah. Akibatnya, banyak OPD di Kota Gorontalo mengalami kebingungan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan nomenklatur baru tersebut. Sebagian besar OPD kesulitan dalam mencocokkan kegiatan lama dengan nomenklatur yang telah direvisi, sehingga input data yang dilakukan ke dalam SIPD sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai kesalahan teknis, seperti penginputan yang tidak sesuai dengan struktur anggaran, serta munculnya jurnal tidak seimbang di mana nilai antara debit dan kredit dalam proses penganggaran tidak sesuai. Ketidakseimbangan ini menyebabkan dokumen tidak dapat diproses lebih lanjut dalam sistem, dan sering kali memerlukan koreksi ulang yang memakan waktu dan tenaga.

Bappeda sebagai koordinator teknis telah melakukan upaya pembinaan melalui monitoring rutin dan pelatihan internal. Namun, kegiatan ini belum mampu menjangkau seluruh OPD secara merata karena keterbatasan jumlah personel ahli di lingkungan Bappeda, tingginya beban kerja, serta tidak adanya mekanisme pelatihan berkelanjutan yang terstruktur. Pelatihan yang dilakukan pun masih bersifat umum dan belum menyentuh permasalahan teknis secara mendalam, seperti kesalahan dalam pengisian akun belanja, pemetaan kegiatan, atau pengisian metadata dokumen. Selain itu, sistem birokrasi SIPD yang sangat tersentralisasi menjadi penghambat utama dalam proses perbaikan data. Ketika terjadi kesalahan input, pengguna daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi secara mandiri. Semua

bentuk koreksi harus diajukan kepada Kemendagri melalui mekanisme permohonan resmi, yang pada umumnya membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan respons. Hal ini memperlihatkan lemahnya otonomi daerah dalam mengelola sistem yang seharusnya bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketidakhadiran SOP lokal atau prosedur fleksibel yang dapat diadopsi oleh Bappeda dan OPD untuk menyelesaikan kendala teknis secara cepat memperburuk kondisi ini. Akibatnya, proses penyusunan dokumen anggaran menjadi lamban, tidak efisien, dan penuh ketidakpastian. Penginputan data harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan, namun di sisi lain, tenggat waktu pengumpulan dokumen yang ketat tidak memberi ruang yang cukup untuk koreksi teknis yang berulang. Di sinilah struktur birokrasi yang kaku dalam SIPD menjadi hambatan sistemik yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat (Karundeng et al., 2021), kelemahan dalam struktur dan kedisiplinan birokrasi telah menjadi salah satu penyebab kegagalan pelaksanaan SIPD di sejumlah daerah.

Masalah ini juga memperlihatkan lemahnya *komunikasi horizontal antar-OPD*. Masing-masing OPD cenderung bekerja secara individual tanpa adanya forum koordinatif yang intensif dan berkelanjutan. Minimnya sinergi dalam memahami nomenklatur baru dan mengatasi hambatan teknis membuat beban penyelesaian masalah tertumpu pada Bappeda sebagai koordinator, sementara OPD hanya bertindak sebagai pelaksana teknis. Padahal, perencanaan dan penganggaran yang efektif memerlukan kolaborasi antarsektor, bukan hanya hubungan vertikal antara OPD dan Bappeda. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi SIPD bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan masalah kelembagaan yang mendasar. Struktur birokrasi yang terlalu tersentralisasi, minimnya pelatihan yang aplikatif, serta lemahnya komunikasi lintas unit menyebabkan sistem yang dirancang untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran justru berpotensi menciptakan ketimpangan, keterlambatan, dan ketidaktepatan dalam penyusunan dokumen daerah. Untuk itu, dibutuhkan desain kebijakan yang lebih responsif, pelatihan teknis berkelanjutan, serta peningkatan otonomi teknis daerah dalam mengelola SIPD secara adaptif dan mandiri.

### **3.3. Kapasitas SDM dan Dukungan Kelembagaan Terhadap Implementasi SIPD**

Salah satu aspek paling krusial yang menjadi hambatan dalam implementasi SIPD di Bappeda Kota Gorontalo adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya dukungan kelembagaan yang memadai. Mayoritas pegawai, baik yang berada di lingkungan Bappeda maupun di OPD lainnya, belum memiliki penguasaan teknis yang cukup terhadap sistem SIPD. Kondisi ini bukan semata karena ketidakmampuan individu, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya pelatihan fungsional dan teknis yang komprehensif dari pemerintah pusat. Selama ini, pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri cenderung bersifat pasif—berupa video tutorial dan dokumen panduan yang tidak diiringi dengan pendampingan atau praktik langsung. Model pelatihan seperti ini tidak menjawab kebutuhan pengguna yang sehari-hari harus berhadapan dengan kompleksitas teknis penginputan kegiatan, anggaran, dan pelaporan. Banyak pegawai mengaku kebingungan dalam memahami alur penginputan dalam SIPD, seperti dalam memilih klasifikasi kegiatan yang sesuai, mencocokkan kode belanja dengan nomenklatur baru, serta menyusun dokumen berdasarkan format yang tersedia dalam sistem. Beberapa informan bahkan menyatakan bahwa mereka melakukan input data hanya karena instruksi dari atasan, tanpa memahami betul konteks atau dampak dari data yang mereka masukkan.

Fenomena ini mencerminkan lemahnya disposisi, yakni sikap dan komitmen pelaksana terhadap tujuan dari kebijakan itu sendiri. Komitmen yang bersifat struktural karena tekanan

organisasi belum dibarengi dengan kesadaran fungsional yang tumbuh dari pemahaman internal terhadap manfaat dan urgensi SIPD sebagai sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data yang terintegrasi. Dari sisi kelembagaan, Bappeda sebenarnya telah menunjukkan inisiatif dengan mengadakan pelatihan internal, melakukan koordinasi lintas unit, dan melakukan pendampingan teknis terhadap OPD. Namun, efektivitas dari upaya tersebut sangat terbatas oleh tingginya beban kerja, minimnya jumlah staf ahli yang benar-benar memahami SIPD secara menyeluruh, dan belum adanya struktur organisasi pendukung seperti unit khusus pendampingan teknis SIPD. Dalam beberapa kasus, pegawai teknis Bappeda harus merangkap tugas koordinasi, monitoring, dan pelatihan sekaligus, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas dan efisiensi kerja secara keseluruhan. Ketika terjadi kesalahan dalam penginputan data, situasinya menjadi lebih rumit. Sistem SIPD tidak memberikan kewenangan lokal bagi admin di daerah untuk mengoreksi atau menghapus data yang telah diinput. Semua bentuk koreksi harus melalui permohonan resmi ke pusat, yang membutuhkan proses verifikasi berlapis dan memakan waktu cukup lama.

Hal ini sangat tidak efisien, terutama jika kesalahan tersebut bersifat teknis ringan yang seharusnya bisa diselesaikan langsung di tingkat daerah. Ketergantungan penuh terhadap otoritas pusat membuat admin dan user SIPD di daerah merasa tidak berdaya dan memperlambat proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator sumber daya dan disposisi pelaksana dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III belum terpenuhi dengan baik dalam konteks implementasi SIPD di Kota Gorontalo. Kapasitas teknis individu yang rendah, lemahnya motivasi intrinsik terhadap kebijakan, serta dukungan kelembagaan yang belum kokoh menyebabkan kebijakan yang secara desain sangat strategis justru terhambat dalam realisasinya. Untuk mencapai efektivitas implementasi yang diharapkan, dibutuhkan penguatan SDM melalui pelatihan yang aplikatif dan berkelanjutan, disertai dengan pembentukan struktur kelembagaan baru yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan teknis secara langsung kepada OPD pengguna SIPD.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama**

Temuan utama dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo masih jauh dari optimal. Walaupun secara formal SIPD telah digunakan sebagai sistem utama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dalam praktiknya masih terdapat banyak kendala yang berkaitan dengan teknis, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi. Penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada belum tersedianya sistem dukungan teknis yang memadai dari pusat, kurangnya kompetensi teknis di daerah, serta keterbatasan fleksibilitas operasional dalam sistem SIPD itu sendiri. Dalam konteks komunikasi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa interaksi antara pemerintah pusat (Kemendagri) dan pemerintah daerah dalam hal teknis pelaksanaan SIPD masih bersifat satu arah. Ketika terjadi gangguan atau error dalam sistem, pengguna di daerah kerap tidak mendapatkan informasi atau petunjuk yang cepat dan jelas. Hal ini memperlihatkan adanya hambatan struktural dalam komunikasi vertikal, yang seharusnya menjadi jalur utama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Teken et al., 2024) yang menyebutkan bahwa lemahnya respons pemerintah pusat terhadap permasalahan teknis di daerah menjadi penghambat signifikan dalam operasionalisasi SIPD.

Dari sisi sumber daya, penelitian ini memperlihatkan bahwa kapasitas SDM di Bappeda dan OPD lain masih terbatas dalam memahami serta mengoperasikan SIPD secara mandiri.

Meskipun terdapat komitmen dari pengguna, keterbatasan dalam pelatihan dan pendampingan dari pusat menyebabkan banyak operator bekerja berdasarkan pengalaman sendiri (learning by doing), bukan dari pemahaman yang utuh atas sistem. Pelatihan dari Kemendagri yang hanya berupa video tutorial tanpa sesi praktik langsung terbukti tidak efektif. Kondisi ini berdampak pada sering terjadinya kesalahan input, duplikasi data, hingga ketidakseimbangan jurnal anggaran yang menghambat validasi dokumen penganggaran. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Sari, 2022) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam implementasi SIPD adalah kurangnya pelatihan teknis yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Scherer & Wimmer, 2012) yang menekankan bahwa penganggaran partisipatif termasuk pengintegrasian teknologi dan sistem informasi memerlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang cukup, serta kesiapan kelembagaan

Pada aspek struktur birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa sistem SIPD terlalu sentralistik dan tidak memberikan ruang otorisasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kesalahan teknis secara mandiri. Misalnya, tidak adanya fitur penghapusan data membuat koreksi terhadap kesalahan input harus menunggu persetujuan dari pusat. Ketergantungan ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Berbeda dengan temuan (Onta et al., 2024) di Kabupaten Minahasa Tenggara yang menunjukkan bahwa SIPD telah berjalan efektif dan mendukung percepatan realisasi anggaran, di Kota Gorontalo SIPD masih menjadi sistem yang bersifat administratif formal, belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat perencanaan strategis berbasis data yang real-time dan terintegrasi.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa meskipun Bappeda telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri, seperti menyelenggarakan pelatihan internal, pendampingan teknis, dan konsultasi ke pusat, namun keterbatasan personel dan beban kerja yang tinggi membuat upaya tersebut belum cukup untuk menjawab kompleksitas sistem SIPD yang terus berkembang. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan daerah dalam merespon perubahan, serta dukungan sistem yang responsif dan fleksibel. Temuan lainnya yang menonjol adalah terkait ketidakseimbangan data antar-OPD, di mana dari 47 OPD, hanya 43 (91,5%) yang telah melakukan penginputan data perencanaan dan penganggaran. Empat OPD lainnya belum menginput data sama sekali, menyebabkan informasi dalam SIPD menjadi tidak lengkap dan menurunkan validitas dokumen perencanaan. Ketidakterlibatan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi internal dan absennya sistem insentif atau sanksi bagi OPD yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD belum berhasil mendorong budaya kerja yang terintegrasi di antara seluruh perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan temuan (Hidayat Fajar, 2022) yang menyatakan bahwa insentif yang diberikan secara adil dan tepat sasaran dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, terutama dalam pengelolaan sistem informasi daerah seperti SIPD

Secara keseluruhan, temuan ini memperluas pemahaman terhadap teori implementasi Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika keempat elemen tersebut tidak terpenuhi secara seimbang, maka kebijakan yang telah dirancang secara sistemik sekalipun dalam hal ini SIPD tidak akan mencapai efektivitas maksimal di tingkat operasional. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya mengenai lemahnya dukungan teknis dan struktur yang terlalu tersentralisasi dalam kebijakan digitalisasi pemerintahan. Namun, penelitian ini juga memberikan perspektif baru dengan menyoroti pentingnya peran kelembagaan daerah

khususnya Bappeda sebagai fasilitator strategis dalam pengelolaan sistem informasi pemerintah yang tidak

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran di Bappeda Kota Gorontalo masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih digunakannya aplikasi pendamping seperti SIMDA, serta belum berfungsinya SIPD sebagai sistem yang sepenuhnya terintegrasi. Meskipun wimmen target dan realisasi anggaran tercapai, proses teknis dan operasional masih menemui banyak kendala, termasuk kurangnya pelatihan, terbatasnya pemahaman pegawai, serta lemahnya respons dari pemerintah pusat terhadap masalah teknis yang terjadi di lapangan. Selain itu, ketidakseimbangan data antar OPD serta masih adanya OPD yang belum menginput data perencanaan dan penganggaran ke dalam SIPD turut menghambat efektivitas sistem. Meskipun begitu, upaya perbaikan telah dilakukan oleh Bappeda, seperti penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan dengan narasumber dari Kemendagri, serta koordinasi langsung dengan pusat untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian hanya terbatas pada satu instansi, yaitu Bappeda Kota Gorontalo, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian membuat pengumpulan data hanya dilakukan dalam periode terbatas. Ketiga, karena metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, maka analisis yang dilakukan belum mencakup evaluasi kuantitatif terhadap kinerja SIPD secara keseluruhan.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) :** Sebagai langkah pengembangan ke depan, penelitian ini menyarankan dilakukannya studi lanjutan dengan pendekatan komparatif di berbagai daerah untuk melihat perbedaan tingkat keberhasilan implementasi SIPD berdasarkan kesiapan kelembagaan dan kapasitas SDM masing-masing daerah. Penelitian mendatang juga diharapkan dapat mengintegrasikan metode kuantitatif untuk mengukur dampak penggunaan SIPD terhadap efisiensi anggaran, kualitas perencanaan pembangunan, dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, perlu dilakukan kajian yang lebih teknis terkait optimalisasi sistem SIPD agar mampu menggantikan seluruh sistem pendamping, serta menciptakan mekanisme umpan balik pusat-daerah yang lebih responsif dan efektif.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang telah memberikan izin, waktu, serta dukungan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh informan, termasuk Kepala Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, serta para admin dan user SIPD yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi seluruh pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Erlambang, P. A. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat salah satu tugas dan fungsi pemerintah Pengelolaan keuangan daerah.*
- Hendra, A. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ( Siagian , n . d ). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi ya.*
- Hidayat Fajar, R. (2022). *Pengaruh Insentif terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Data Perencanaan Daerah.* <https://ejournal.ipdn.ac.id/IAPD/article/view/4122>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Onta, P. N., Engka, D. S. M., & A.J., V. M. (2024). Analisis perencanaan dan penganggaran pada pemerintah kabupaten minahasa tenggara melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (sipd). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 25(1), 100–112.
- Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 242–248. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>
- Scherer, S., & Wimmer, M. A. (2012). *Reference Process Model for Participatory Budgeting in Germany*. 97–111.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Teken, I. K. A., Romarina, A., & Korespondensi, P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar Penulis : Afiliasi : Email : 4(2), 111–123.
- Ulrich, P., Rieg, R., & Stockert, F. (2024). A Systematic Overview on the Literature in the Fields of Digitalization in Planning, Budgeting and Forecasting. *30th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2024, August*, 2–4.
- Vira, Y., & Husna, C. A. (2022). Implementasi Sipd (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Dalam Proses Perencanaan Di Kabupaten Aceh Barat. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1(9), 536–541. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i9.68>
- Yamin, N. Y., Lawaidjo, M. R., & Ridwan. (2025). Moderation of Human Resource Competencies in Quality of Financial Statements: Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, and Control Environment. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 1539–1551. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5968>